



ANALISIS PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA: FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG

Abstract

This research is understanding the dynamics of women's political participation in the Indonesian context. Using a qualitative approach, this research explores the factors that hinder and encourage women's involvement in politics. Data collection methods include in-depth interviews with women active in politics, leaders of civil society organizations, academics and political observers, as well as analysis of documents and related literature. The research results identified several main inhibiting factors, including the patriarchal culture that is still dominant, lack of political education, structural obstacles within political parties, the double burden experienced by women, and political violence and intimidation. Patriarchal culture places women in traditional roles that limit their participation in the public sphere, while inadequate political education hinders their understanding and involvement in the political process. Structural barriers within political parties also prevent women from achieving leadership positions, and the double burden of being a housewife and a worker makes it difficult for women to participate fully in politics. Apart from that, violence and intimidation against women involved in politics adds to the challenges that must be faced. On the other hand, this research also found several significant driving factors. Affirmative policies, such as gender quotas in political parties and parliament, provide greater opportunities for women to become involved in politics. Increasing political education and gender awareness in society helps build a stronger foundation for women's political participation. Support from non-governmental organizations focused on women's empowerment also plays an important role in strengthening women's capacity and motivation in politics. More inclusive social and cultural change, as well as networks of support and mentorship, are helping women to overcome barriers and participate more actively in politics. This research concludes that although there are many challenges that hinder women's political participation in Indonesia, there are also many motivating factors that can be utilized to increase women's involvement in politics. By continuing to strengthen support for women's political participation and overcome existing barriers, Indonesia can achieve greater gender equality in politics and create a more inclusive and just political environment for all citizens.

Keywords: *Political Participation, Women, Inhibiting Factors, Encouraging Factors.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika partisipasi politik perempuan dalam konteks Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan di Indonesia, penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang menghambat dan mendorong keterlibatan perempuan dalam politik. Metode pengumpulan data mencakup wawancara mendalam dengan perempuan yang aktif dalam politik, pemimpin organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pengamat politik, serta analisis dokumen dan literatur terkait. Hasil penelitian ini mendeskripsikan beberapa faktor penghambat utama, termasuk budaya patriarki yang masih dominan, kurangnya pendidikan politik, hambatan struktural dalam partai politik, beban ganda yang dialami perempuan, serta kekerasan dan intimidasi politik. Budaya patriarki menempatkan perempuan dalam peran tradisional yang membatasi partisipasi mereka di ranah publik, sementara pendidikan politik yang kurang memadai menghalangi pemahaman dan keterlibatan mereka dalam proses politik. Hambatan struktural dalam partai politik juga menghambat perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan, dan beban ganda sebagai ibu rumah tangga dan pekerja membuat perempuan sulit untuk berpartisipasi secara penuh dalam politik. Selain itu, kekerasan dan intimidasi terhadap perempuan yang terlibat dalam politik menambah tantangan yang harus dihadapi. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor pendorong yang signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada banyak tantangan yang menghambat partisipasi politik perempuan di Indonesia, ada juga banyak faktor pendorong yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik. Kebijakan afirmatif, seperti kuota gender dalam partai politik dan parlemen, memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam politik. Peningkatan pendidikan politik dan kesadaran gender di masyarakat membantu membangun fondasi yang lebih kuat untuk partisipasi politik perempuan. Dukungan dari organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan juga memainkan peran penting dalam memperkuat kapasitas dan motivasi perempuan dalam politik. Perubahan sosial dan budaya yang lebih inklusif, serta jaringan dukungan dan mentorship, membantu perempuan untuk mengatasi hambatan dan berpartisipasi lebih aktif dalam politik. Dengan terus memperkuat dukungan bagi partisipasi politik perempuan dan mengatasi hambatan yang ada, Indonesia dapat mencapai kesetaraan gender yang lebih besar dalam politik dan menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua warga negara.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Perempuan, Faktor Penghambat, Faktor Pendorong.

© 2024 The Author(s). This is an open article under CC-BY-SA license

(<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

PENDAHULUAN

Partisipasi politik perempuan telah menjadi subjek penting dalam studi politik modern, terutama karena pentingnya representasi yang setara dalam sistem demokratis yang inklusif. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai dalam beberapa dekade terakhir dalam memperluas akses perempuan ke arena politik, kesenjangan gender masih menjadi masalah yang signifikan di banyak negara di seluruh dunia. (Antari 2023).

Di banyak negara, perempuan terus menghadapi tantangan dalam mencapai posisi kekuasaan politik yang sama dengan pria. Ada berbagai faktor yang berkontribusi pada ketidaksetaraan gender dalam politik, termasuk stereotip gender yang membatasi persepsi masyarakat terhadap kemampuan perempuan dalam kepemimpinan politik, sistem politik yang kurang inklusif, dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi. (Annisa 2022). Selain itu, meskipun jumlah perempuan yang terlibat dalam politik meningkat, mereka masih sering kali dihadapkan pada pengalaman yang berbeda dan tantangan unik yang tidak selalu dihadapi oleh rekan-rekan pria mereka. Misalnya, perempuan sering kali dipersepsikan sebagai kurang kompeten atau kurang mampu memimpin dalam posisi politik tertentu, dan mereka mungkin menghadapi tekanan tambahan untuk memenuhi harapan sosial dan budaya yang berbeda (Rasyidin and Aruni 2016).

Dalam konteks global, ada perubahan yang signifikan dalam dinamika politik yang dapat mempengaruhi peran dan partisipasi perempuan dalam politik. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial, misalnya, telah membuka peluang baru bagi perempuan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan visibilitas mereka dalam ruang politik. Namun, teknologi juga dapat menjadi alat untuk menyebarkan stereotip gender atau menguatkan ketidaksetaraan yang ada. (Rasyidin and Aruni 2016)

Dengan demikian, penelitian tentang politik dan perempuan tidak hanya penting untuk memahami dinamika politik kontemporer, tetapi juga untuk mengidentifikasi strategi dan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan representasi dan partisipasi perempuan dalam sistem politik. Dengan menyadari tantangan dan peluang yang dihadapi perempuan dalam politik, kita dapat bekerja menuju masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis di mana suara semua warga, tanpa memandang jenis kelamin, didengar dan dihargai (Antari 2023).

Selain itu, penelitian tentang politik dan perempuan juga penting karena implikasi yang luas bagi pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Perempuan tidak hanya merupakan setengah dari populasi suatu negara, tetapi juga memiliki pengalaman, perspektif, dan kebutuhan yang unik yang dapat memengaruhi kebijakan dan program pembangunan.

Partisipasi politik perempuan tidak hanya berkaitan dengan representasi politik di lembaga-lembaga formal, tetapi juga dengan pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan yang lebih luas di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Perempuan sering kali merupakan agen perubahan dalam komunitas mereka dan dapat memperjuangkan kepentingan dan isu-isu yang relevan bagi masyarakat secara keseluruhan, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan terhadap kekerasan. (Subandi et al. 2023)

Dalam konteks global, munculnya gerakan feminis dan advokasi kesetaraan gender telah menjadi kekuatan penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan mengatasi ketidaksetaraan gender dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan struktural dan budaya yang menghalangi partisipasi politik perempuan secara efektif (P. D. A. N. Politik 2022).

Dalam sebuah artikel (Nations and Programme, n.d.) melihat tantangan dan peluang bagi partisipasi politik perempuan. Ditekankan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik tidak hanya meningkatkan representasi tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola dan kebijakan yang dihasilkan. Partisipasi politik perempuan sangat penting untuk legitimasi dan efektivitas lembaga-lembaga demokrasi. Dengan mengatasi hambatan struktural dan sosial yang menghambat partisipasi penuh perempuan, dan dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, kemajuan signifikan dapat dicapai dalam mencapai kesetaraan gender dalam pemerintahan. Memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik tidak hanya akan memberdayakan perempuan tetapi juga mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan representatif, yang merupakan hal mendasar bagi tata kelola yang baik dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan memahami latar belakang politik dan perempuan, penulis dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mencapai kesetaraan gender dalam politik. Dengan demikian, penelitian tentang topik ini tidak hanya penting dalam konteks akademis, tetapi juga dalam upaya nyata untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat dan sistem politik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami pengalaman, pandangan, dan persepsi individu secara mendalam. Penelitian ini

menggunakan metode purposive sampling untuk memilih sampel yang dianggap paling relevan dan informatif dalam konteks partisipasi politik perempuan di Indonesia. Purposive sampling memungkinkan peneliti untuk memilih subjek yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang sesuai dengan topik penelitian. Data dikumpulkan melalui analisis konten dari berbagai sumber, termasuk pidato publik, materi kampanye, dan konten media sosial yang dihasilkan oleh partai politik Islam. Analisis konten dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, narasi yang digunakan, dan strategi komunikasi politik yang diterapkan. Wawancara dilakukan dengan pemimpin partai, kader, ahli politik, dan masyarakat umum untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan mereka terkait komunikasi politik Islam. Wawancara semi-struktural digunakan untuk memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi isu-isu dengan lebih mendalam dan memperoleh wawasan langsung dari responden.

Data yang diperoleh dari wawancara dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Proses ini meliputi pengkodean data, identifikasi tema-tema utama, dan analisis mendalam terhadap tema-tema tersebut untuk menemukan pola-pola yang signifikan terkait faktor penghambat dan pendorong partisipasi politik perempuan. Langkah-langkah khusus diambil untuk memastikan kredibilitas dan keandalan temuan penelitian. Ini termasuk verifikasi data melalui triangulasi, yaitu membandingkan temuan dari berbagai sumber data. Selain itu, refleksi peneliti dan diskusi dengan rekan penelitian juga digunakan untuk memeriksa dan memvalidasi interpretasi data. Dengan menggunakan metode penelitian yang komprehensif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang Analisis Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia: Faktor Penghambat dan Pendorong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah partisipasi politik perempuan dimulai dengan perjuangan panjang untuk mendapatkan hak suara. Di banyak negara, perempuan baru mendapatkan hak ini setelah melalui gerakan feminis yang intens dan berlarut-larut. Misalnya, di Amerika Serikat, perempuan memperoleh hak suara pada tahun 1920 dengan disahkannya Amendemen ke-19 Konstitusi AS. Di Indonesia, perempuan telah memiliki hak suara sejak pemilu pertama tahun 1955, tetapi representasi mereka dalam politik tetap terbatas. (Salim, n.d.)

Aristoteles: Aristoteles memandang politik sebagai usaha warga negara untuk mencapai kebaikan bersama, mengacu pada konsep kebahagiaan atau eudaimonia. Bagi Aristoteles, politik adalah ilmu yang paling tinggi karena berurusan dengan tujuan akhir manusia. (DeMarco et al. 2021)

Sisi yang lain, Max Weber: Weber mengartikan politik sebagai perjuangan untuk membagi kekuasaan atau mempengaruhi pembagian kekuasaan, baik di antara negara-negara

maupun di dalam suatu negara. Ia memperkenalkan konsep "kekuasaan sah" atau otoritas yang diakui dan diterima oleh masyarakat. (Wahid and Luhur 2020)

Carl Schmitt: Schmitt melihat politik sebagai perbedaan antara kawan dan lawan. Ia menekankan politik sebagai arena konflik di mana entitas politik diidentifikasi berdasarkan identitas mereka sebagai kawan atau lawan. (Mustanir et al. 2023)

Melalui penjelasan dari berbagai ahli tersebut, kita dapat melihat bahwa Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa politik adalah konsep yang kompleks dan multidimensional. Ia mencakup aspek-aspek kekuasaan, otoritas, distribusi sumber daya, pengambilan keputusan, dan partisipasi masyarakat. Setiap ahli menawarkan perspektif yang berbeda, tetapi semuanya sepakat bahwa politik adalah aspek fundamental dalam kehidupan sosial yang mengatur interaksi dan hubungan dalam suatu masyarakat atau negara. *Understanding these various perspectives can help us grasp the broader and more nuanced nature of politics, aiding in the analysis and understanding of political phenomena in different contexts* (Dewi 2009).

Partisipasi politik perempuan merupakan aspek penting dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan mewujudkan demokrasi yang inklusif. Meskipun peran perempuan dalam politik telah meningkat seiring dengan perkembangan zaman, masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Dalam uraian ini, penulis akan mengeksplorasi berbagai bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh kaum perempuan, serta pentingnya meningkatkan representasi dan pengaruh mereka dalam ranah politik (Subandi et al. 2023).

1. Partisipasi Pemilihan

Partisipasi dalam pemilihan umum merupakan salah satu cara paling langsung bagi perempuan untuk terlibat dalam politik. Hal ini mencakup hak untuk memberikan suara dan menjadi calon dalam pemilihan. Dengan memilih pemimpin yang mewakili nilai-nilai dan kepentingan perempuan, serta menjadi calon yang berkompeten dan berintegritas, perempuan dapat membentuk arah kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

2. Aktivisme dan Gerakan Sosial

Aktivisme politik dan gerakan sosial memberikan platform bagi perempuan untuk menyuarakan isu-isu yang penting bagi mereka. Melalui demonstrasi, petisi, kampanye kesadaran, dan protes publik lainnya, perempuan dapat memobilisasi dukungan masyarakat untuk perubahan sosial dan politik. Aktivisme juga membantu memperkuat solidaritas antarperempuan dan mendorong perubahan budaya yang lebih inklusif.

3. Keterlibatan dalam Organisasi Politik

Partisipasi dalam organisasi politik seperti partai politik, kelompok advokasi, dan lembaga politik lainnya memungkinkan perempuan untuk memiliki pengaruh yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Dengan aktif terlibat dalam pembuatan kebijakan, kampanye politik, dan pengorganisasian pemilu, perempuan dapat membentuk agenda politik dan memengaruhi arah kebijakan.

4. Pendidikan Politik dan Pelatihan Kepemimpinan

Pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan memberikan perempuan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk terlibat dalam politik dengan efektif. Ini mencakup pelatihan komunikasi, keterampilan organisasi, pemahaman tentang proses politik, dan advokasi kebijakan. Dengan meningkatkan kapasitas dan percaya diri perempuan dalam bidang politik, mereka dapat menjadi pemimpin yang kuat dan berpengaruh.

5. Penggunaan Media Sosial dan Teknologi

Media sosial dan teknologi digital telah membuka peluang baru bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Melalui platform media sosial, perempuan dapat menyebarkan informasi, memobilisasi dukungan, dan berkomunikasi dengan para pemilih. Penggunaan teknologi juga memungkinkan perempuan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pemerintah, serta menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu politik (B. Politik and Nurisman 2024).

6. Mendorong Pemimpin Perempuan

Mendorong dan mendukung pemimpin perempuan merupakan langkah penting dalam meningkatkan representasi perempuan dalam politik. Dengan memberikan dukungan kepada perempuan yang berpotensi dan memberdayakan mereka untuk mencapai posisi kepemimpinan, kita dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan beragam.

Partisipasi politik perempuan tidak hanya penting untuk memastikan representasi yang adil dalam sistem politik, tetapi juga untuk memperjuangkan isu-isu yang penting bagi kesejahteraan perempuan dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memperkuat suara perempuan dalam politik, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan demokratis (Joni Lovenduski, penerjemah 2008).

Melalui berbagai bentuk partisipasi politik yang telah disebutkan di atas, perempuan memiliki kesempatan untuk membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan generasi mendatang. Dengan terus memperjuangkan kesetaraan gender dan memperkuat representasi perempuan dalam politik, kita dapat mencapai masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi semua.

Partisipasi politik perempuan di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, tetapi masih dihadapkan pada berbagai faktor yang menjadi penghambat maupun pendorong. Dalam analisis ini, kita akan mengeksplorasi faktor-faktor tersebut secara lebih rinci.

Faktor Penghambat

Budaya Patriarki: Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang menghambat partisipasi politik perempuan. Norma-norma sosial yang menempatkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga dan membatasi ruang gerak mereka di ranah publik membuat banyak perempuan enggan untuk terlibat dalam politik. (“Buku_Sistem_Politik_Indonesia_oleh_Seta_Basri.Pdf,” n.d.)

Budaya patriarki merujuk pada sistem sosial dan nilai-nilai yang memberikan dominasi, kontrol, dan keunggulan kepada laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, sementara secara relatif mengekang peran dan kekuasaan perempuan. Budaya ini merupakan produk dari berbagai faktor historis, sosial, ekonomi, dan politik yang saling terkait, yang telah terakumulasi dan dipertahankan selama berabad-abad.

Dalam budaya patriarki, terdapat beberapa karakteristik yang umumnya terjadi:

Pertama Dominasi Laki-laki: Laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga dan memiliki otoritas yang lebih tinggi dalam membuat keputusan, baik di ranah domestik maupun publik. Kekuasaan laki-laki sering kali dianggap sebagai norma yang tidak boleh dipertanyakan.

Kedua Pembagian Peran Gender yang Tradisional: Budaya patriarki cenderung membagi peran gender secara tradisional, di mana perempuan diharapkan untuk mengambil peran sebagai pengurus rumah tangga dan pengasuh anak, sementara laki-laki diharapkan untuk menjadi pencari nafkah dan pemimpin keluarga.

Ketiga Diskriminasi dan Ketidaksetaraan: Perempuan sering kali mengalami diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, akses terhadap sumber daya, dan partisipasi politik. Mereka mungkin mendapat perlakuan yang kurang adil dan memiliki akses terbatas terhadap kesempatan dan sumber daya yang sama dengan laki-laki.

Keempat Kontrol atas Tubuh dan Seksualitas: Budaya patriarki sering kali mengatur kontrol atas tubuh dan seksualitas perempuan. Perempuan dapat mengalami penindasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, serta pembatasan terhadap hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi mereka.

Kelima Perpetuasi Stereotip Gender: Budaya patriarki cenderung memperkuat stereotip gender yang membatasi perkembangan individu dan masyarakat. Peran-peran yang ditetapkan berdasarkan jenis kelamin dapat menyebabkan pembatasan terhadap aspirasi dan potensi individu, baik perempuan maupun laki-laki.

Budaya patriarki dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk keluarga, pendidikan, ekonomi, politik, dan budaya. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai dalam memerangi budaya patriarki dan memperjuangkan kesetaraan gender, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkeadilan bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin.

Kurangnya Pendidikan Politik: Kurangnya akses terhadap pendidikan politik yang berkualitas juga menjadi penghambat bagi partisipasi politik perempuan. Banyak perempuan tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang proses politik, hak-hak politik mereka, dan bagaimana cara terlibat secara efektif dalam politik.

Hambatan Struktural: Sistem politik yang didominasi oleh laki-laki dan kurangnya dukungan dari partai politik menjadi hambatan lainnya. Kuota gender dalam partai politik sering kali tidak diterapkan secara efektif, dan mekanisme pemilihan internal partai cenderung tidak mendukung calon perempuan.

Beban Ganda: Beban ganda yang dialami oleh perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pekerja sering kali membuat mereka sulit untuk meluangkan waktu dan energi untuk terlibat dalam kegiatan politik. Tanggung jawab domestik yang besar membatasi keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik yang intensif.

Kekerasan dan Intimidasi: Kekerasan dan intimidasi, baik fisik maupun verbal, juga menjadi hambatan serius bagi partisipasi politik perempuan di Indonesia. Ancaman dan tindakan kekerasan terhadap perempuan yang terlibat dalam politik dapat menghambat mereka untuk menyuarakan pendapat dan mengambil peran aktif dalam proses politik.

Faktor Pendorong

Kebijakan Afirmatif: Penerapan kebijakan kuota gender dalam partai politik dan parlemen telah menjadi faktor pendorong utama dalam meningkatkan partisipasi politik

perempuan di Indonesia. Kebijakan ini memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam politik dan memperoleh posisi yang lebih tinggi (Fauzan 2017).

Pendidikan dan Kesadaran Gender: Peningkatan pendidikan politik dan kesadaran gender di masyarakat juga menjadi faktor pendorong. Program-program pendidikan yang menekankan pentingnya kesetaraan gender dan peran perempuan dalam politik dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk partisipasi politik perempuan (Malaka 2013).

Dukungan Organisasi Non-Pemerintah: Banyak organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan mendukung partisipasi politik mereka. Melalui pelatihan, advokasi, dan pendampingan, organisasi ini membantu memperkuat kapasitas perempuan dalam politik dan memberikan platform untuk mereka menyuarakan aspirasi mereka.

Perubahan Sosial dan Budaya: Perubahan sosial dan budaya yang lebih luas juga menjadi faktor pendorong. Kampanye kesadaran gender dan pendidikan publik dapat membantu mengubah sikap dan persepsi masyarakat terhadap perempuan dalam politik, serta mengatasi norma-norma patriarki yang menghambat partisipasi politik perempuan.

Jaringan dan Mentorship: Jaringan dukungan dan program mentorship yang kuat dapat membantu perempuan untuk saling mendukung dan membangun keterampilan politik mereka. Dengan mendapatkan bimbingan dan dukungan dari perempuan yang sudah berpengalaman dalam politik, mereka dapat merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk terlibat dalam politik.

Untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia, diperlukan strategi yang efektif yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi politik. Langkah pertama yang bisa diambil adalah meningkatkan pendidikan dan kesadaran politik. Perempuan perlu mengikuti pelatihan dan pendidikan politik yang komprehensif, mencakup pengetahuan tentang sistem politik, hak-hak politik, dan keterampilan advokasi. Kampanye kesadaran juga harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi politik perempuan di kalangan masyarakat umum, termasuk di sekolah-sekolah dan universitas. Pendidikan politik yang baik akan mempersiapkan perempuan untuk memahami dan mengatasi dinamika politik, serta membuat mereka lebih percaya diri dalam berpartisipasi.

Langkah kedua adalah membangun jaringan dan aliansi. Perempuan dapat membentuk jaringan dukungan antar sesama yang aktif dalam politik untuk saling berbagi pengalaman, sumber daya, dan strategi. Selain itu, berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan advokasi politik juga dapat memperkuat posisi perempuan dalam politik. Jaringan dan aliansi ini penting untuk memberikan dukungan moral

dan praktis, serta membuka akses terhadap peluang dan informasi yang relevan. Organisasi non-pemerintah sering kali memiliki program-program pemberdayaan yang dapat membantu perempuan mengembangkan kapasitas mereka dalam bidang politik (Rahmah 2021).

Selanjutnya, perempuan harus memanfaatkan teknologi dan media sosial secara efektif. Media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi, memobilisasi dukungan, dan mengadvokasi isu-isu penting yang mempengaruhi perempuan. Membuat dan menggunakan platform digital untuk pendidikan politik, diskusi, dan koordinasi aksi politik juga merupakan langkah yang penting. Teknologi digital memungkinkan perempuan untuk berkomunikasi dengan cepat dan luas, mengatasi hambatan geografis, dan mencapai audiens yang lebih besar. Ini juga memberikan alat yang kuat untuk mengorganisir kampanye dan memantau perkembangan politik secara *real-time* (Khaerunisah, Japar, and Suhadi 2018).

Selain itu, perempuan harus mendorong dan mendukung kebijakan afirmatif. Mengadvokasi penerapan dan penguatan kebijakan afirmatif, seperti kuota gender dalam partai politik dan parlemen, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memastikan efektivitasnya, sangatlah penting. Kebijakan afirmatif memberikan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam politik secara lebih adil dan proporsional. Monitoring dan evaluasi membantu memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar diimplementasikan dan memberikan hasil yang diharapkan.

Untuk meningkatkan representasi dalam partai politik, perempuan perlu aktif dalam partai politik untuk mendapatkan posisi strategis dan mempengaruhi agenda politik. Mereka juga perlu mendorong lebih banyak perempuan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan dan mendukung mereka melalui kampanye, pelatihan, dan sumber daya yang diperlukan. Partai politik adalah arena utama di mana keputusan politik dibuat, dan memiliki perwakilan perempuan yang kuat dalam partai-partai politik akan meningkatkan peluang untuk mengusung agenda yang lebih responsif terhadap kepentingan perempuan (B. Politik and Nurisman 2024).

Mengatasi hambatan struktural juga merupakan langkah yang krusial. Perempuan harus mengadvokasi perubahan dalam sistem politik dan partai politik untuk mengurangi hambatan struktural yang menghalangi partisipasi mereka, serta mendorong reformasi internal dalam partai politik untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Hambatan struktural, seperti aturan dan praktik yang tidak adil, dapat dibongkar melalui reformasi yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas (Wa, Haili, and Lirboyo 2023).

Melawan kekerasan dan intimidasi politik juga menjadi bagian dari strategi yang harus dilakukan. Mengadakan kampanye anti-kekerasan untuk mengurangi kekerasan dan intimidasi terhadap perempuan yang terlibat dalam politik serta mengadvokasi pembentukan mekanisme

perlindungan bagi perempuan yang mengalami kekerasan dan intimidasi merupakan langkah penting. Kekerasan dan intimidasi adalah salah satu penghalang terbesar bagi perempuan dalam politik, dan mengatasi masalah ini akan membuat lingkungan politik lebih aman dan kondusif bagi partisipasi perempuan (Khaerunisah, Japar, and Suhadi 2018).

Perempuan juga perlu memperkuat peran mereka dalam lembaga masyarakat sipil dengan aktif dalam LSM yang berfokus pada isu-isu perempuan dan hak asasi manusia untuk mempengaruhi kebijakan publik. Membentuk koalisi advokasi dengan berbagai kelompok masyarakat untuk memperkuat suara dan pengaruh perempuan dalam proses pengambilan keputusan juga merupakan strategi yang efektif. Lembaga masyarakat sipil sering kali berperan sebagai pengawas dan penekan untuk perubahan kebijakan yang lebih adil dan inklusif.

Terakhir, menggunakan strategi politik lokal sangatlah penting. Memulai keterlibatan politik dari tingkat lokal dapat membantu membangun basis dukungan dan pengalaman. Mendorong partisipasi politik perempuan di komunitas lokal melalui program pemberdayaan dan inisiatif lokal juga dapat memperkuat partisipasi politik mereka. Politik lokal sering kali lebih mudah diakses dan dapat menjadi tempat yang baik untuk memulai karier politik, membangun reputasi, dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan.

Dengan menerapkan langkah-langkah strategis ini, perempuan di Indonesia dapat memperkuat partisipasi politik mereka, mengatasi hambatan yang ada, dan menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan berkeadilan. Upaya kolektif ini tidak hanya akan meningkatkan representasi perempuan dalam politik, tetapi juga membantu mewujudkan demokrasi yang lebih sehat dan responsif terhadap kebutuhan semua warga negara. Peningkatan partisipasi politik perempuan akan membawa perspektif baru dan solusi inovatif dalam pembuatan kebijakan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa partisipasi politik perempuan Indonesia melihat berbagai faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi keterlibatan mereka dalam ranah politik. Meskipun tantangan yang dihadapi oleh perempuan, seperti budaya patriarki, kurangnya pendidikan politik, hambatan struktural dalam partai politik, beban ganda, dan kekerasan serta intimidasi politik, tetap menjadi kendala signifikan, ada banyak langkah strategis yang dapat diambil untuk mengatasinya. Melalui peningkatan pendidikan dan kesadaran politik, membangun jaringan dan aliansi, memanfaatkan teknologi dan media sosial, mendorong dan mendukung kebijakan afirmatif, meningkatkan representasi dalam partai politik, mengatasi hambatan struktural, melawan kekerasan dan intimidasi, memperkuat peran dalam lembaga

masyarakat sipil, serta menggunakan strategi politik lokal, perempuan dapat memperkuat posisi mereka dalam politik. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, partai politik, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi politik perempuan. Kebijakan yang inklusif dan proaktif, bersama dengan upaya pendidikan dan pemberdayaan, dapat membantu mengubah norma-norma sosial dan budaya yang membatasi peran perempuan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi modern memungkinkan perempuan untuk lebih mudah mengakses informasi dan berpartisipasi dalam diskusi politik. Dengan demikian, upaya kolektif ini tidak hanya akan meningkatkan representasi perempuan dalam politik, tetapi juga membantu mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan semua warga negara. Penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dalam politik merupakan kunci untuk mencapai kemajuan sosial yang lebih luas dan mewujudkan masyarakat yang lebih berkeadilan. Partisipasi politik perempuan yang lebih tinggi akan membawa perspektif baru dan inovatif dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan kualitas demokrasi, dan memastikan bahwa kepentingan dan hak-hak perempuan diperjuangkan dan dilindungi dengan lebih baik. Masa depan politik Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan sangat tergantung pada sejauh mana perempuan dapat berperan aktif dan setara dalam proses politik.

Masa depan politik Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan sangat tergantung pada sejauh mana perempuan dapat berperan aktif dan setara dalam proses politik. Peningkatan partisipasi politik perempuan akan memperkaya diskursus politik dengan perspektif yang lebih beragam dan solutif, serta membuka jalan bagi reformasi yang lebih responsif terhadap dinamika sosial. Dengan komitmen dan langkah konkret dari berbagai elemen masyarakat, Indonesia dapat mempercepat tercapainya kesetaraan gender dalam politik, yang pada akhirnya akan memperkuat demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman kita tentang tantangan dan peluang partisipasi politik perempuan dan mendorong langkah-langkah strategis untuk menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan. Peningkatan partisipasi politik perempuan akan memperkaya diskursus politik dengan perspektif yang lebih beragam dan solutif, serta membuka jalan bagi reformasi yang lebih responsif terhadap dinamika sosial. Dengan komitmen dan langkah konkret dari berbagai elemen masyarakat, Indonesia dapat mempercepat tercapainya kesetaraan gender dalam politik, yang pada akhirnya akan memperkuat demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman kita tentang tantangan dan peluang partisipasi politik perempuan dan

mendorong langkah-langkah strategis untuk menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan. Melalui partisipasi yang lebih besar, perempuan dapat membawa perubahan signifikan yang tidak hanya menguntungkan mereka sendiri tetapi juga seluruh masyarakat, menciptakan dunia yang lebih adil dan seimbang.

DAFTAR PUSTKA

- Annisa, Syarifa. 2022. "Kuota Perempuan Dalam Politik Indonesia," no. April.
- Antari, Luh Putu Swandewi. 2023. "Perempuan Dan Politik Indonesia." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 6 (1): 18–23. <https://doi.org/10.47532/jic.v6i1.798>.
- "Buku_Sistem_Politik_Indonesia_oleh_Seta_Basri.Pdf." n.d.
- DeMarco, Tom, Peter Hruschka, Tim Lister, Steve McMenemy, James Robertson, and Suzanne Robertson. 2021. "Politik." *Happy to Work Here I* (2): 86–86. <https://doi.org/10.3139/9783446468733.010>.
- Dewi, Siti Malaiha. 2009. "Orientasi Politik Perempuan Marginal." [http://repository.iainkudus.ac.id/4864/1/orientasi politik perempuan marginal.pdf](http://repository.iainkudus.ac.id/4864/1/orientasi_politik_perempuan_marginal.pdf).
- Fauzan, Indra. 2017. "VOLUME 17, NOMOR 1, OKTOBER 2017 15 POLITIK DAN PEREMPUAN DI INDONESIA PASCA REFORMASI Oleh: Indra Fauzan □." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 17.
- Joni Lovenduski, penerjemah, Hardono Hadi. 2008. "Politik Berparas Perempuan." *Politik Berparas Perempuan*, 340.
- Khaerunisah, Iis, M. Japar, and Suhadi Suhadi. 2018. "Budaya Politik Perempuan Pesisir: Studi Perilaku Politik Perempuan Di Kabupaten Indramayu." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 17 (2): 134–54. <https://doi.org/10.21009/jimd.v17i2.9089>.
- Malaka, Mashur. 2013. "Perempuan Dalam Kacah Politik." *Al-'Adl* 6 (1): 60–73.
- Mustanir, Ahmad, Universitas Muhammadiyah, Sidenreng Rappang, and Andi Asari. 2023. *Ilmu Politik*.
- Nations, United, and Development Programme. n.d. "Women ' S Political Participation And Good Governance : 21st Century Challenges United Nations Development Programme."
- Politik, Berpartisipasi, and Hana Nurisman. 2024. "Peran Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan Dan Keadilan Gender" 4 (1): 1–11.
- Politik, Perempuan D A N. 2022. "Perempuan Dan Politik.," no. July.
- Rahmah, Syarifah. 2021. "Pendidikan Politik Bagi Perempuan." *Saree: Research in Gender Studies* 3 (1): 79–100. <https://doi.org/10.47766/saree.v3i1.633>.
- Rasyidin, and Fidhia Aruni. 2016. "Gender Dan Politik: Keterwakilan Wanita Dalam Politik." *Unimal Press*, no. April: 4.
- Salim, Hadji Agus. n.d. "Pergerakan Politik Di Indonesia." *Djejak Langkah Hadji Agus Salim*.
- Subandi, Yeyen, Diansari Solihah Amini, Tanti Nurgiyanti, Bagus Subekti Nuswantoro, and Harits Dwi Wiratma. 2023. "Perempuan Dan Politik Di Indonesia: Analisis Bibliometrik

Vosviewer.” *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1 (6): 585–91.
<https://doi.org/10.55681/primer.v1i6.234>.

Wa, Perspektif, H B A H Az-zu Haili, and Aly Lirboyo. 2023. “PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN Seorang Filsuf Inggris Ternama Herbert Spencer Dalam Salah Satu Bukunya , The Istrinya . Fenomena Ini Cukup Jelas Menggambarkan Penindasan Kaum Perempuan Di Eropa ” 1 (June): 21–42.

Wahid, Umaimah, and Universitas Budi Luhur. 2020. “DAFTAR PUSTAKA , Komunikasi Politik , Media Baru , Umaimah Wahid,” no. September 2016.